

## Suara “Sang Cenderawasih” yang Membisu: Perjuangan Para Perempuan Papua dalam Menggapai Keadilan

### *Voice of the Silence “Cenderawasih”: Papuan Women Struggle to Reach Justice*

**Diana Binkor Jenbise**

STFT GKI I.S.Kijne  
Jalan Sosiri, Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura  
Papua, 99351

jenbisediana@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 8 Oktober 2021, direvisi 21 Oktober 2021, diputuskan diterima 8 November 2021

#### Abstract

This article emphasizes the importance of raising the issue of Papuan women's empowerment and struggle for justice. This research is to answer, what is justice according to Papuan women and how are Papuan women's efforts to achieve justice for their identity and the land of Papua? In answering questions and the realities faced by women in achieving justice, this research seeks freedom of talks about the rights of Papuan women in the life of the state and society. However, there are a patriarchal system and a state that make it difficult in listening to and responding to women's voices about justice. It takes time and effort to change this old paradigm. Through the first form of storytelling, we can place the story of the identity of a Papuan woman and her pride as a symbol of cenderawasih with dark skin and curly hair. Papuan women must not remain silent and must fight for justice.

Keywords: justice for papuan women, papuan women storytelling, papuan women, silence cenderawasih, telling story

#### Abstrak

Artikel ini menegaskan pentingnya mengangkat isu pemberdayaan dan perjuangan perempuan Papua dalam menggapai keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apa itu keadilan menurut perempuan Papua serta bagaimana usaha perempuan Papua untuk meraih keadilan bagi jati diri mereka dan tanah Papua? Dalam menanggapi pertanyaan dan kenyataan yang dihadapi perempuan dalam menggapai keadilan, penelitian ini mengangkat kebebasan atau kemerdekaan berbicara tentang hak-hak perempuan Papua di dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Namun, kenyataannya ada sistem patriarki dan negara yang menyulitkan dalam mendengarkan serta menanggapi suara perempuan tentang keadilan. Butuh waktu dan upaya untuk mengubah paradigma lama ini. Melalui bentuk penceritaan pertama, dapat kita tempatkan cerita identitas perempuan Papua dan kebanggaannya sebagai simbol cenderawasih dengan kulit yang gelap dan rambut keriting. Perempuan Papua tidak boleh diam dan harus berjuang untuk menyuarkan keadilan.

Kata kunci: keadilan untuk perempuan papua, penceritaan pertama perempuan papua, perempuan papua, cenderawasih yang membisu, *telling story*

### Pendahuluan

Telah banyak telaah mengenai perempuan Papua dalam perjuangan menggapai keadilan. Namun, sampai saat ini suara perempuan Papua bagaikan “sang cenderawasih” yang membisu karena tidak mampu untuk menyuarkan apa yang diinginkannya terkait kebebasan berpendapat. Perlu kita ingat mengenai pengalaman politik Papua sebelum dan sejak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963, terutama secara yuridis disahkan di dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera (1969) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengikutsertakan 1025 orang Papua sebagai tanda sahnya proses integrasi

Papua dengan Indonesia (Saltford 2003, h. 5). Namun bagi masyarakat Papua, pengalaman politik ini tidak serta-merta menjamin kebebasan mereka. Kebebasan tersebut menjadi sesuatu yang langka khususnya bagi perempuan Papua.

Kebebasan masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat kerap kali dibatasi Pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu pengalaman pahit orang Papua adalah tidak adanya kebebasan menyuarkan apa yang dirasakannya sebagai rakyat Indonesia. Jaminan hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum seperti tertuang di dalam UUD 1945

itu tidak berlaku di Papua. Bahkan dalam penyampaian tuntutan pemenuhan hak dan keadilan di muka umum bagi orang Papua yang dilakukan secara damai, kerap berujung pada pembubaran secara paksa dan penangkapan. Ada anggapan atau kecurigaan terhadap aspirasi orang Papua. Ketika orang Papua membicarakan keadilan maka tindakan tersebut dianggap sebagai bagian wacana separatis. Kritik dan masukan disamakan atau dianggap sebagai upaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan cita-cita reformasi salah satunya adalah penghargaan dan jaminan atas hak kebebasan berpendapat. Namun, tampaknya semangat tersebut tidak terasa semangatnya di wilayah Papua. Hal ini disebabkan adanya stigma separatis yang telah menjadi label bagi orang Papua termasuk perempuan yang memperjuangkan keadilan bagi orang dan tanah Papua.

Di dalam buku "Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009" (Pokja MRP & Komnas Perempuan 2009) dilaporkan bahwa kekerasan negara baik secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan pihak keamanan Republik (TNI dan Polri) Indonesia terhadap perempuan Papua sejak tahun 1963-1998. Ada 138 kasus (Pokja MRP & Komnas Perempuan 2009, h. 20) dan di antara tahun 1998-2009 terdapat hampir 40 kasus kekerasan negara terhadap perempuan Papua (Pokja MRP & Komnas Perempuan 2009, hh. 31-41). Sedangkan sejak tahun 2009 sampai 2021 belum adanya laporan yang mendetail tentang kekerasan dari negara terhadap perempuan Papua. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan negara terhadap perempuan yang belum terungkap karena banyak perempuan Papua korban kekerasan memilih membisu untuk tidak mengungkapkan kasus yang dialami. Hal ini terjadi karena orang Papua terlebih khusus perempuan Papua terbiasa dibungkam hingga membisu dan membutuhkan pendampingan untuk dapat mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan inginkan untuk suatu nilai keadilan bagi kehidupan pribadi serta komunitasnya.

Selain aspek politik, mengentalnya sistem adat istiadat yang didominasi oleh laki-laki Papua menjadi salah satu alasan mengapa perempuan Papua sulit mengaktualisasikan dirinya untuk menyatakan idenya mengenai konsep keadilan menurut kacamata seorang perempuan. Pada bulan September tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua melaporkan bahwa ada 47 kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT)

terhadap perempuan dan anak yang dialami baik oleh perempuan asli Papua dan non-Papua (Papua.go.id). Ini belum termasuk kasus KDRT di Provinsi Papua Barat. Menurut laporan, angka tertinggi KDRT dialami oleh perempuan asli Papua. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa pemicu utama KDRT di wilayah Papua adalah minuman keras, sementara alasan lain sifatnya sekunder. Laporan ini menunjukkan bahwa perempuan Papua sampai saat ini masih menjadi korban kekerasan dari laki-laki Papua—yang masih memegang teguh sistem patriarki, memandang perempuan sebagai objek, dan tidak melihat perempuan sebagai pasangan setara yang juga memiliki hak hidup dan kebebasan. Jumlah kasus KDRT yang tergambar di atas menunjukkan bahwa belum semua perempuan Papua mempunyai keberanian untuk melaporkan kasusnya. Hal ini terjadi karena kuatnya sistem patriarki di Papua, yang membuat perempuan Papua terbiasa menganggapnya sebagai suatu takdir kalau mengalami perlakuan tidak adil dari laki-laki. Jelas sekali terlihat dalam konteks adat Papua, ada diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tergambar jelas seperti dalam pekerjaan rumah tangga dan proses pendidikan anak dalam rumah tangga—sebagai tanggung jawab perempuan atau ibu. Selanjutnya mengenai hak milik (tanah, harta, dan sebagainya) dan pengambilan keputusan dalam keluarga, dikuasai sepenuhnya oleh laki-laki. Hal ini dapat ditemukan secara merata di semua wilayah adat Papua. Beberapa wilayah adat di Papua bahkan memperbolehkan poligami bagi laki-laki bila tidak memperoleh anak laki-laki yang akan mewarisi hak-hak secara adat. Akibatnya, pada beberapa suku di Papua, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak penting atau dengan kata lain kekerasan terhadap perempuan ditoleransi.

Namun di sisi lain, perempuan Papua, terutama di kota-kota, yang memiliki pekerjaan, akses informasi dan teknologi, serta pendidikan formal dan informal, sudah sadar akan hak hidupnya sebagai perempuan. Mereka berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan dalam adat Papua. Sayangnya sistem patriarki mengakar sangat kuat di Papua, sehingga sulit mengubah pemahaman laki-laki Papua yang masih teguh memegang sistem patriarki. Oleh sebab itu, proses pendidikan dengan pendekatan kesetaraan gender menjadi suatu kebutuhan hakiki untuk mendorong transformasi sosial di masyarakat Papua, agar menghargai dan mendukung kesetaraan gender.

## Metode Penelitian

Situasi politik dan sistem patriarki yang dihadapi oleh perempuan Papua menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan Papua. Terutama dalam upaya menggapai keadilan dan bagaimana usaha untuk tidak hidup di dalam kebisuannya. Ini alasan penting mengapa penelitian ini diperlukan, dengan mengangkat kembali cerita-cerita (*telling story*) beberapa perempuan Papua yang memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan yang dialaminya. Elsa Tamez, seorang teolog asal Meksiko mengatakan bahwa metode *telling story* mengungkapkan pentingnya melihat tubuh dan kehidupan perempuan sebagai teks suci (1998). Penelitian ini juga mengkaji, memahami, dan mendeskripsikan hakikat perjuangan perempuan di dalam menggapai keadilan dan interaksi sosial yang melekat di dalamnya (Silverman & Marvasti 2008, h. 14). Selanjutnya analisis dokumen (Flick 2014, h. 369) digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen tentang cerita pengalaman perempuan Papua yang dilihat melalui teori pascakolonial yang dikembangkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak (2010).

Narasumber diidentifikasi dan dipilih berdasarkan pengalaman serta kedekatan dengan persoalan ketidakadilan yang dialami perempuan Papua. Narasumber terdiri dari para pemikir dan perempuan Papua yang berjuang untuk menggapai keadilan. Penggalian informasi dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam yang dikumpulkan hingga bulan September 2021. Wawancara dan pengumpulan cerita ini berfokus pada pengalaman subjektif, yang selama ini disembunyikan karena tidak mendapat kesempatan untuk didengarkan. Penelitian ini hendak menunjukkan suara para perempuan Papua yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan komunitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat kesadaran akan keadilan bagi kalangan perempuan secara khusus dan bagi orang Papua secara umum.

Masalah yang ingin diungkapkan di dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan Papua menceritakan kembali bagaimana perjuangannya untuk menerobos kebisuan di dalam menggapai keadilan. Persoalan ini terkait dengan kesadaran bahwa sangat sulit bagi orang Papua, khususnya bagi perempuan Papua untuk mengekspresikan dirinya dan keluar dari kebisuan untuk perjuangan menggapai keadilan. Oleh karena itu, terkait dengan upaya mengangkat penceritaan pertama Perempuan Papua, penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan utama yaitu: Apakah yang menjadi potensi perempuan Papua untuk mengekspresikan jati

dirinya? dan Bagaimana memberdayakan perempuan Papua di dalam perjuangan untuk menggapai keadilan?

## Membincang dan Mengupayakan Keadilan bagi Perempuan Papua

Pembahasan mengenai suara perempuan Papua sebagai suara "sang cenderawasih" yang membisu penting diangkat untuk memahami bagaimana inisiatif perjuangan para perempuan Papua dalam menggapai keadilan. Untuk menguatkan pembahasan, perlu ada landasan konseptual atau tinjauan literatur yang dibangun dalam artikel ini. Ada tiga landasan konseptual yang digunakan dalam artikel ini yaitu:

### *Tinjauan Literatur Mengenai Konsep Kebebasan dan Keadilan*

Kebebasan atau kemerdekaan adalah salah satu dasar dari hak dan martabat manusia. Kebebasan atau kemerdekaan adalah hak setiap manusia untuk bertindak, berbicara dan berpikir tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain. Kebebasan juga berkaitan dengan konsep keadilan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas berekspresi tanpa tekanan dari orang lain. Dengan demikian perempuan harus memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan untuk menyatakan jati dirinya. Analisis mengenai persoalan pencapaian kebebasan dan keadilan perempuan Papua akan diperkuat berdasarkan landasan teori suara *subaltern* dari teori pascakolonial Gayatri Chakravorty Spivak, serta bagaimana penceritaan pertama (*telling story*) digunakan dalam melihat perjuangan para perempuan Papua untuk menggapai keadilan.

### *Teori Pascakolonial dari Gayatri Chakravorty Spivak dalam Perjuangan penegakan Keadilan*

Ada persoalan besar terkait bagaimana suara yang dianggap sebagai kelompok *subaltern* sulit untuk didengarkan dalam perjuangan penegakan keadilan. Kelompok *subaltern* merupakan kelompok yang dianggap kelas kedua, termarginalisasi, atau kelompok yang membisu seperti suara para perempuan Papua. Masalah ini juga dialami oleh banyak kelompok dalam masyarakat (yang dianggap secara hierarkis) dunia ketiga seperti di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Masyarakat dunia ketiga memiliki pengalaman bersama sebagai eks-koloni dunia Barat, mengalami apa yang disebut sebagai kelompok *subaltern* atau kelompok bawahan yang tidak memiliki kemampuan untuk

mengungkapkan apa yang dialaminya. Situasi *subaltern* yang dialami masyarakat dunia ketiga juga secara khusus dialami oleh orang Papua, terutama perempuannya. Landasan teori yang menguatkan kondisi ini tercermin di dalam artikel penting dari seorang pascakolonial India, Gayatri Chakravorty Spivak yang menulis tentang “*Can the Subaltern Speak?*”

Pengertian *subaltern* mengacu pada kelompok sosial yang diklasifikasikan sebagai kelompok bawahan atau rendahan yang tidak termasuk dalam kelompok elite (Spivak 2010). Spivak melihat kelompok *subaltern* sebagai subjek yang tertindas. Kelompok *subaltern* adalah kelas terendah yang menjadi sasaran hinaan, kebencian, dan kekerasan (Spivak 2010). Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak pilihan atau kapasitas untuk bertindak secara independen dalam membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, namun struktur sosial membatasi hak pilihan seseorang.

Dalam kerangka teori pascakolonial dari Spivak, orang Papua, khususnya perempuannya, merupakan *subaltern*. Kondisi *subaltern* ini terwujud dari pengalaman orang Papua untuk dapat mengakses dan terlibat secara penuh dan utuh dalam ranah publik. Kelompok *subaltern* tidak dapat mengekspresikan aspirasi mereka. Kelompok *subaltern* tidak memiliki ruang untuk mendefinisikan kondisi mereka—walaupun mereka sendirilah yang melakukan pekerjaan untuk menyatakan keberadaan/situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan intelektual sebagai mediator yang dapat mendorong mereka berbicara tentang hak mereka (Spivak 2010). Spivak mencoba memahami pertanyaan mengenai “dapatkah kelompok bawahan atau rendahan berbicara?” Menurut Spivak, hal tersebut dapat dilakukan—kelompok *subaltern* dapat berbicara melalui para intelektual yang bertindak sebagai mediator yang mendorong kelompok tak bersuara untuk menyuarakan apa yang menjadi hak mereka (Spivak 2010).

Apabila kita kaitkan persoalan mengenai mediasi untuk berbicara ini, maka perempuan Papua membutuhkan para intelektual perempuan Papua sebagai mediator. Peran mereka untuk mendorong dan memberdayakan perempuan Papua agar keluar dari kebisuannya dan berjuang menggapai keadilan sebagai warga negara Indonesia—masyarakat Papua tidak boleh lagi dikategorikan sebagai warga kelas kedua di Indonesia. Pola pikir warisan kolonialisme membuat orang Papua termasuk perempuannya dilihat sebagai kelompok *subaltern* karena berada di luar ranah kekuasaan, terutama hierarki kekuasaan penjajah (Rumaseb 2013, hh. 5-7). Perempuan Papua mendapat dampak dari kategorisasi sebagai *subaltern* sehingga dianggap juga

sebagai kelompok celaka. Pada pendekatan lain secara psikologis, dampak penempatan kondisi *subaltern* pada orang Papua dan perempuannya membuat mereka tertekan karena tidak memiliki kebebasan untuk berpikir sendiri. Ada sebagian elite Papua yang lebih memilih untuk “aman” dengan cara tetap menjadi kaki tangan penguasa. Hal ini seperti dalam konteks pascakolonial, dilakukan para elite lokal untuk menghindari tuduhan penjahat sebagai perlawanan terhadap penguasa.

Teori pascakolonial yang dikemukakan oleh Spivak sangat menolong para intelektual perempuan Papua untuk mengkaji persoalan. Sehingga mereka dapat berfungsi sebagai mediator yang menolong perempuan Papua yang masih membisu, takut untuk bersuara, dan menuntut hak hidupnya sebagai manusia yang selama ini telah dirugikan oleh sistem adat patriarki yang telah berakar di dalam segala sendi kehidupan orang Papua. Perjuangan untuk menggapai keadilan bagi orang dan tanah Papua harus dilihat sebagai pekerjaan bersama baik perempuan dan laki-laki Papua.

#### *Telling Story sebagai Wahana Mengekspresi Ide Keadilan yang Membisu*

Berangkat dari kebutuhan mewujudkan mediasi suara dalam teori pascakolonial Spivak, perlu ada pendekatan lain terkait penceritaan pertama. Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk mengeluarkan suara perempuan Papua sebagai Sang Cenderwasih yang membisu, melalui proses “*telling story*”. *Telling Story* dapat digunakan oleh para perempuan Papua sebagai suatu wahana untuk mengekspresikan ide keadilan yang telah membisu sekian lama. Hal ini disebabkan banyaknya ruang politik dengan dasar sistem patriarki yang tidak memberi tempat bagi perempuan untuk berekspresi.

*Telling story* secara sederhana diterjemahkan di dalam Bahasa Indonesia sebagai “*bercerita*.” Ini menjadi metode yang tepat untuk mendengar kembali apa yang dialami, dipikirkan dan dirasakan oleh sang pencerita—sebagai subjek pertama. *Telling story* menjadi wujud sang pencerita mengekspresikan idenya yang mungkin selama ini dipendam atau dibungkam. Elsa Tamez, seorang teolog Kristen feminis dari Meksiko, mengungkapkan bahwa:

Tubuh perempuan kemudian dapat memanifestasikan dirinya sebagai teks suci yang menetapkan cerita mereka untuk dibaca dan dibaca ulang dan menghasilkan tindakan dan sikap yang membebaskan. Kehidupan perempuan mengabadikan tata bahasa yang mendalam, yang morfologi dan sintaksisnya perlu dipelajari demi hubungan antar manusia yang lebih baik (Tamez 1998, h. 63).

Apa yang diungkapkan Tamez ini penting karena pemahaman mengenai *sacred text* (teks suci) selalu berkaitan dengan kitab-kitab suci agama-agama dunia. Namun, Tamez menunjukkan bahwa tubuh para perempuan merupakan teks suci yang sesungguhnya, karena kehidupan para perempuan itu adalah teks hidup yang dapat dibaca dan terbaca (Tamez 1998). Bahasa tubuh seorang perempuan akan mengekspresikan apa yang selama ini dipendamnya dan melalui *telling story* perempuan didorong mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya. Melalui konsep Tamez tentang *sacred text* dan *telling story*, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong perempuan Papua mengekspresikan idenya. Suara yang tersampaikan dapat digunakan untuk perjuangan menggapai keadilan yang selama ini diidamkan. Tentunya perjuangan perempuan Papua untuk melepaskan diri dari penderitaan, diskriminasi, dan marginalisasi dalam masyarakat tidaklah mudah. Namun, para intelektual perempuan Papua dapat berperan menjadi mediator untuk menjadi pendamping bagi mereka yang selama ini terbungkam. Dalam pemahaman ini maka perempuan Papua yang selama ini seperti "sang cenderawasih" membisu dapat menceritakan apa yang menjadi pengalamannya untuk menggapai keadilan.

### Suara "Sang Cenderawasih" yang Membisu

Topik dalam artikel ini terinspirasi dari maskot Papua yang selalu mengagung-agungkan cenderawasih. Cenderawasih adalah nama burung di Papua yang dikenal dengan sebutan burung surga (*the bird of Paradise/Paradisaeidae*). Burung cenderawasih hidup di Papua, Papua New Guinea, dan sebelah timur Australia. Cenderawasih memiliki 43 spesies dengan karakteristik dicirikan oleh bulu yang lebat dengan warna-warna cantik seperti hitam, coklat, kemerahan, oranye, kuning, putih, biru, hijau, dan ungu, dengan antena panjang serta berwarna-warni (Bariarcianur & Yunus 2011, hh. 81-83; Van Hasselt 2002, hh. 9-11). Secara tradisional, orang Papua percaya bahwa cenderawasih adalah burung dari surga (Permana 2019). Cenderawasih bagi orang Papua adalah simbol kebesaran dan kehadiran makhluk tertinggi dalam hidup mereka.

Berdasarkan arti nama atau etimologinya, cenderawasih adalah penggabungan dari dua suku kata yaitu *cendra* yang berarti *allah/ilah/dewa atau dewi*, dan *wasih* yang berarti *utusan*. Jadi, Cenderawasih berarti utusan para ilah atau dewa dan dewi (Permana 2019). Secara tradisional, orang Papua percaya bahwa cenderawasih adalah titisan dewa. Dalam upacara adat, masyarakat Papua menggunakan burung atau bulu

burung cenderawasih sebagai topi dan pakaian adat. Tokoh adat Papua memakai cenderawasih sebagai lambang kebesaran yang diberikan dewa. Apalagi warna burung cenderawasih menjadi bentuk utama lukisan yang menutupi tubuh orang Papua saat mereka melakukan upacara adat. Orang Papua menyamakan warna cenderawasih dengan kulit orang Papua. Bulu burung mencerminkan bentuk rambut orang Papua yang keriting dan warna kulit yang gelap, serta kecokelatan.

Orang Papua sangat bangga disebut cenderawasih. Apalagi perempuan Papua senang menyebut diri sebagai "sang cenderawasih" dan perempuan yang berasal dari luar Papua sebagai "merpati". Salah satu keunikan burung cenderawasih adalah suka menari dan bersiul dengan indah. Orang Papua menciptakan tarian dan lagu tradisional yang menggunakan cara tarian dan siulan cenderawasih. Warna bulu cenderawasih begitu indah sehingga memukau orang yang melihatnya. Cenderawasih adalah burung yang pintar dalam hal melindungi dirinya sendiri. Misalnya, ketika manusia mendekatinya, ia pergi ke tempat yang lebih aman, seperti hutan yang tidak disentuh manusia. Ia menghindari bahaya ketika ancaman datang. Sayangnya, populasi Cenderawasih semakin berkurang karena perburuan dan penebangan hutan di Papua. Untuk melindungi diri lebih jauh, burung-burung ini telah bermigrasi ke daerah pedalaman Papua yang belum tersentuh pembangunan.

Orang Papua yang terdiri dari 250 suku lebih, dipersatukan di bawah lambang burung cenderawasih. Orang Papua juga percaya bahwa peta pulau Papua menyerupai bentuk burung cenderawasih. Orang Papua menggunakan cenderawasih untuk menggambarkan karakteristik dan tanah mereka, yang keduanya berbeda dari orang dan tempat lain di dunia. Cenderawasih memiliki arti khusus bagi orang Papua. Orang Papua memandang cenderawasih sebagai burung Papua dan sebagai simbol unik identitas Papua. Orang Papua menggunakan cenderawasih untuk mengklaim identitas mereka. Cenderawasih muncul dalam lagu *Sup Mambesak* (Negeri Cenderawasih). Lagu ini ditulis oleh musisi Papua Simon Wambrau dan Sam Kapisa (Ap 1978, h. 23):

*Sup mambesak Manseren byuk be aya,  
ya newen da man be a wawaos  
Bon bekaki mandif nary or ro bo  
Randak ro so ron isof maroke  
Kuker sawarwar swa ruser yena  
Manser'n Ryo us aya kada  
Sup beryan Manser'n byuk be aya  
Kuker payam yum na  
Yawaren warek na?*

Terjemahannya adalah:

*Negeri Cenderawasih, Yang Allah beri bagiku  
Tanah yang selalu dipercakapkan  
Dengan gunungnya yang tinggi  
Terbentang dari Sorong sampai Merauke  
Dengan seluruh cinta dan pikiranku  
Tuhan jaga kami  
Tanah yang diberikan bagi kami  
Dengan keindahan alamnya  
Bisakah saya menjaga dan melindunginya?*

Selama berabad-abad, kehidupan perempuan mengalami banyak rintangan. Perempuan telah menghadapi banyak diskriminasi dalam negara dan masyarakat. Perempuan di dunia telah berbagi pengalaman yang sama, yaitu di dalam budaya dan masyarakat patriarki sebagai golongan kelas dua. Kondisi diskriminatif ini juga dialami oleh perempuan Papua. Menghadapi kondisi ini, perempuan Papua sedang berjuang untuk keluar dari paradigma tradisional yang membagi manusia menurut jenis kelamin dan gender (konstruksi sosial). Ini juga menjadi tugas perempuan Papua untuk merekonstruksi citra sebagai perempuan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia—tanpa bias gender.

Perjuangan perempuan Papua untuk menggapai keadilan menjadi sebuah topik studi yang berusaha untuk menceritakan kembali kisah-kisah perempuan Papua, berdasarkan tubuh dan pengalaman hidup mereka. Di samping itu, kita dapat melihat bagaimana mereka terhubung satu sama lain untuk berjuang keluar dari kebisuannya. Kisah-kisah perempuan Papua menjadi teks suci. Teks suci ini bukan hanya kitab suci atau teks suci di dalam setiap agama tetapi juga pengalaman hidup manusia. Teks suci perempuan terdiri dari tubuh, kehidupan, dan pengalaman perempuan saat mereka berjuang untuk melepaskan diri dari penderitaan, diskriminasi, dan marginalisasi dalam masyarakat dan juga institusi keagamaan yang masih bersifat patriarki.

### **Telling Story Perempuan Papua yang Berjuang Menggapai Keadilan**

*Telling story* perempuan Papua yang berjuang menggapai keadilan menunjukkan bahwa sesungguhnya “sang cenderawasih”, simbol para perempuan Papua, tidak boleh lagi membisu dan harus berani keluar dari tekanan. Upaya ini akan membebaskan perempuan Papua untuk

bebas berbagi cerita tentang pengalamannya dan jati dirinya.

### **“Sang Cenderawasih” itu Tidak Boleh Membisu**

Berangkat dari teori *subaltern* Spivak, maka harus ditemukan mediasi (Spivak 2010) bagi para perempuan Papua bercerita. Upaya ini dilakukan agar “sang cenderawasih” tidak lagi membisu. Suara perempuan Papua, berdasarkan cerita dari pengalaman hidup mereka akan menjadi suara bagi keadilan di tanah Papua. Teori pascakolonial dari Spivak menguatkan konsep yang dibutuhkan dalam artikel ini untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan dalam membuka selubung ketakutan yang selama ini dialami oleh orang Papua terlebih khusus perempuan Papua untuk mencari keadilan.

Peran kelompok intelektual dari perempuan Papua sangat penting. Mereka akan menjadi motivator dan mediator untuk sesama perempuan, terutama untuk memberi rasa percaya diri dalam mengekspresikan diri sebagai manusia. Melalui mediasi suara ini perempuan Papua harus menyadari bahwa ia pun memiliki hak untuk menyampaikan idenya tanpa ketakutan akan hegemoni penguasa. Salah satu yang dapat dilakukan adalah keluar dari zona nyaman, yakni kebisuannya. Cerita dari para perempuan Papua ini akan menjadi tanda bahwa “sang cenderawasih” masih ada untuk tanah dan negerinya.

### **Cerita “Sang Cenderawasih” dalam Kungkungan Sistem Adat Patriarki**

Sekitar tahun 1987, pada waktu saya masih Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP), keluarga kami dikunjungi oleh keluarga Bapa saya dari kampung. Di dalam perjumpaan itu, istri dari kakak Bapak saya yang tertua mengatakan kepada saya dan adik saya yang perempuan demikian: “*Mengapa harus sekolah, bukankah perempuan itu ditakdirkan untuk menikah agar mas kawin keluarga pihak laki-laki kembali dan memang sudah kodratnya perempuan untuk melahirkan anak-anak bagi suaminya serta mengurus dapur?*” Pada waktu itu saya dan adik saya hanya saling memandang. Namun, ada hal yang luar biasa dari Ibu saya yang mengatakan: “*jangan sama seperti saya, tapi kalian berdua sekolah saja, jangan dengar apa yang dikatakan oleh mama tuamu itu.*”

Memahami apa yang dikatakan oleh istri kakak Bapak saya itu menggambarkan sosok seorang perempuan Papua yang benar-benar telah terdoktrinasi dengan sistem patriarki dan mengagungkannya. Saya melihat

betapa sulitnya perempuan Papua untuk keluar dan menyatakan dirinya bahwa ia memiliki hak. Semua yang dikatakan dan diatur oleh laki-laki dianggap sebagai hal benar. Sayangnya, keinginan saya untuk menanyakan istri dari kakak Bapak saya tentang apakah ia pernah menikmati hidupnya sebagai seorang perempuan yang tunduk pada tatanan patriarki tidak pernah terwujud sebab dia telah meninggal dalam kebisuannya. Namun, saya bersyukur karena Ibu saya adalah seorang perempuan Papua yang mampu mengatakan secara simbolis kepada saya bahwa tak selamanya "sang cenderawasih" itu akan membisu dan dibungkam. Ibu saya berbicara untuk dirinya sendiri seperti yang diungkapkan oleh Spivak (2010) dan dikuatkan dengan teori Tamez (1998).

Seiring berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan studi di Sekolah Teologi I.S.Kijne Jayapura, Papua, dan menjadi Pendeta di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, saya bertemu dengan para perempuan Papua Kristen yang bagaikan "sang cenderawasih" yang membisu dan sulit menggapai keadilan bagi dirinya sendiri. Ada beberapa kasus yang saya dapati: ada perempuan Papua yang ditekan oleh suaminya karena tidak memiliki anak laki-laki, ada juga suami yang tidak setuju istrinya bekerja. Selain itu ada suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk berbicara terkait urusan adat, apalagi menyangkut masalah hak-hak terhadap tanah, warisan dan para-para adat atau rapat adat, dan masih banyak lagi persoalan yang dialami perempuan Papua. Bahkan pernah ada seorang Bapak mengatakan kepada saya bahwa: "*Perempuan itu kalau sudah dibayar mas kawannya itu sama seperti barang yang telah dibeli di toko dan karena harganya telah lunas, maka mau diperlakukan apa saja, itu terserah sang pembeli karena sudah menjadi milik pribadi.*" Dengan penuh semangat Bapak tersebut menyatakan bahwa istrinya telah lunas secara adat. Jadi tugas istrinya adalah melayaninya dan memperoleh banyak anak baginya. Pada waktu itu saya berpikir apa reaksi istrinya, memang saya harapkan adanya aksi protes terhadap ketidakadilan, tapi sayangnya istrinya pun mengangguk menyetujui. Entah apa yang ada di dalam pikirannya namun saya melihat ini sebagai tantangan perempuan Papua untuk menyuarakan keadilan bagi diri dan perempuan lainnya.

Perempuan Papua harus berjuang untuk menggapai keadilan bagi dirinya. Perjuangan ini perlu ditopang oleh kelompok intelektual perempuan Papua dan juga didukung oleh laki-laki Papua yang memahami makna kesetaraan gender, untuk menjadi mediator yang membuka tabir percakapan antara laki-laki Papua yang

masih memegang teguh sistem patriarki dan perempuan Papua untuk tiba pada kesepahaman bersama bahwa perjuangan orang Papua untuk meraih keadilan harus dikerjakan bersama.

Perjuangan orang Papua adalah melawan sistem negara yang masih melihat orang Papua sebagai *subaltern* atau bawahan (rendahan). Hal inilah yang hendak saya bagikan lewat *telling story* dari empat orang perempuan Papua yang berusaha untuk keluar dari kebisuan dan menggapai keadilan di tengah sistem negara yang tidak memberi ruang bagi orang Papua untuk menyatakan pendapat secara bebas di muka umum.

### **Telling Story "Sang Cenderawasih" yang Bersuara untuk Keadilan**

Cenderawasih memang burung yang indah, bahkan orang Papua memujanya bahkan mengidentikkannya dengan warna kulit dan rambut mereka. Namun, dalam pengalaman saya ternyata tidak mudah menjadi "sang cenderawasih" dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1981, ketika saya masih di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Ujung Pandang (sekarang dikenal dengan kota Makassar), ada beberapa teman sekolah bahkan anak tetangga yang memanggil saya, beserta saudara saya dan anak-anak Papua yang mengikuti orang tua studi di Makassar dengan sebutan "*leleng pui*," bila diartikan dalam bahasa Makassar sebagai "hitam pekat." Selain itu, mereka menyebut kami dengan sebutan rambut "kawat duri." Ternyata bukan hanya di era saya sekolah saja terjadi diskriminasi terhadap orang Papua. Peristiwa tersebut terulang kembali terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2018. Ini menggambarkan sikap rasialisme terhadap sesama anak bangsa Indonesia masih sama—diskriminatif. Terkadang terpikirkan slogan yang berbunyi "meng-Indonesiakan orang Papua." Pertanyaannya adalah "Apa yang mau di-Indonesiakan?" mengingat bahwa Papua adalah Indonesia. Rasialisme adalah ancaman terhadap demokrasi, terhadap kehidupan bersama yang menjunjung keadilan. Ide persatuan dan kesatuan sesungguhnya digerogoti dengan ada dan suburnya praktik diskriminasi berbasis ras dan kategori identitas lainnya.

Itulah mengapa pada bagian ini saya hendak bercerita tentang empat kisah perempuan Papua yang mungkin suaranya tidak pernah didengar. Namun, suara mereka penting untuk menunjukkan bagaimana perjuangannya untuk menggapai keadilan di tengah situasi yang tidak memungkinkan.

Perjuangan perempuan sebagai “sang cenderawasih” yang tidak lagi membisu di dalam menggapai keadilan, saya temukan pertama di dalam kisah Ibu saya, EA. Ia menceritakan pengalaman penderitaannya sebagai seorang Istri Pendeta Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua atau Irian Barat pada waktu Penentuan Pendapat Rakyat-PEPERA (1969). Ia menyaksikan bagaimana orang Papua yang menolak berintegrasi Indonesia disiksa. Bapak saya, PLJ yang pada waktu itu sebagai seorang pendeta berdiri untuk menyatakan pembelaannya terhadap hak orang-orang Papua yang disiksa oleh militer Indonesia. Bapak saya merasa bahwa tindakan penyiksaan sebagai suatu bentuk pelanggaran atas hak hidup manusia yang tidak sesuai dengan kitab suci agama apapun. Akibat dari aksi protes Bapak saya berujung pada penangkapan dan dipenjara dalam kurun waktu beberapa bulan. Pada waktu itu Ibu saya sedang mengandung anak pertamanya. Bahkan ketika melahirkan pun, ibu saya seorang diri berjuang karena suaminya yang sedang berada di penjara. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh ibu saya pada waktu itu adalah berjuang untuk keadilan bagi suaminya agar dibebaskan. Namun, di dalam situasi seperti itu tidak mudah sebagai seorang perempuan muda untuk berjuang untuk sebuah nilai keadilan. Walaupun pada akhirnya Bapak saya dikeluarkan dari penjara, namun pembebasannya terjadi karena tidak cukup bukti keterlibatan di dalam penolakan terhadap PEPERA. Cukup lama cerita ini dipendam oleh ibu saya dan ketika ia menceritakan ulang, membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan cerita tersebut.

Kisah yang kedua dari seorang ibu Papua dengan inisial YKB (Alm.). Pada tahun 1984, ketika pada masa diberlakukannya daerah operasi militer (DOM) di Papua (Irian Jaya di dalam penyebutan pada masa itu) terjadi penangkapan para aktivis, seniman dan budayawan Papua. Arnold Clemens Ap (1945—1984), seorang budayawan, antropolog, dan musisi Papua, beserta Edward Mofu adalah dua korban yang ditangkap pada tahun tersebut. Penangkapan ini dilakukan pihak militer sebagai pelaksana perintah negara dengan tuduhan sebagai bagian dari anggota kelompok Papua Merdeka yang sedang berjuang memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Sebelum terjadi penangkapan, Edward Mofu tinggal di rumah YKB. Ketika terjadi penangkapan Edward Mofu pun tidak diketahui oleh keluarga. Namun, kegigihan YKB untuk berjuang mencari keadilan dan ia bisa menemukan Arnold C. Ap dan Edward Mofu di penjara yang sengaja disembunyikan aparat keamanan dari pihak keluarga. Pada masa itu di

Papua khususnya di kota Jayapura tidak ada seorang laki-laki Papua pun yang mencari keadilan bagi pembebasan Ap dan Mofu. Semua diam di dalam kebisuan, kilah YKB. Tentu siapa yang mau berjuang menantang maut. Semua orang Papua pada waktu itu takut akan kekejaman rezim Soeharto. Sampai pada kematian Edward Mofu yang dinyatakan tenggelam di laut Base-G pada saat proses pelariannya dari penjara, aparat keamanan pun tanpa pernah memberikan penjelasan bagaimana bisa Mofu keluar dari penjara yang dijaga ketat pada waktu itu. Bagi YKB, ia meminta keadilan negara untuk transparan tentang kematian saudaranya, Edward Mofu, namun tak kunjung ia dapati. Beberapa hari setelah kematian Edward Mofu, diikuti dengan kematian Arnold C. Ap. Kematian mereka berdua menurut YKB, adalah suatu peristiwa yang sangat tragis dan melukai hati keluarga yang ditinggalkan serta orang dan negeri Papua. Walaupun negara menyembunyikan kasus kematian Ap dan Mofu, namun YKB mempunyai keyakinan bahwa keadilan dan kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya tanpa perlu diteriakkan atau dicari. Semua akan terbuka pada waktunya.

Kisah ketiga berasal dari seorang perempuan muda Papua dari Merauke dengan inisial HRG. HRG memiliki pengalaman pahit sebagai anak gadis yang tumbuh dalam keluarga tidak harmonis (terjadi perceraian). Bapaknyanya kawin lagi dan meninggalkan ia bersama dengan ibunya. Tataan adat patriarkal Papua memberi ruang untuk seorang laki-laki bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Ibu HRG membawa penderitaan tersebut hingga akhir hayatnya. Sepeninggal ibunya, HRG terpaksa tinggal dan dirawat oleh kakek dan nenek ibunya yang adalah seorang penginjil Kristen. Ia kadang menghadapi kekerasan dari pamannya, bahkan ia menceritakan pernah hampir dipotong menggunakan kapak. HRG berjuang untuk keluar dari penderitaannya. Ia berusaha berjuang untuk tetap sekolah, karena kakek dan merupakan motivator yang mendorongnya untuk terus mencapai impiannya. Di sisi lain, HRG juga melihat bahwa penderitaan yang dialaminya di dalam keluarga ternyata tidaklah lebih besar dari penderitaan dari orang Papua di dalam menuntut keadilan terhadap hak dan martabatnya di atas negeri Papua. Ia berpikir harus berjuang mengatasi persoalan pribadinya dan perjuangan menggapai keadilan bagi orang Papua serta negerinya. Tekadnya untuk meneruskan pendidikannya berlanjut saat HRG kuliah pada tahun 2015 dan pada bulan Maret 2019, ia diwisuda menjadi seorang pustakawan. Setelah ia tamat, HRG kembali ke Merauke-Papua. Ia membuka sekolah, perpustakaan, terlibat penginjilan

untuk mendidik orang di Merauke tentang kesetaraan gender, dan ia juga terlibat secara aktif dalam kampanye keadilan untuk orang Papua melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia memilih untuk terlibat dengan KNPB karena baginya identitasnya sebagai perempuan Papua dalam melawan sistem patriarki adat Papua, serta hegemoni negara yang menekan orang Papua untuk dibungkam—sehingga suaranya bisa disuarakan.

Kisah keempat berasal dari seorang mahasiswi teologi, dengan inisial FD dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi GKI I.S.Kijne Jayapura. FD mengisahkan bahwa ibunya menceritakan bahwa sekitar era 1980-an, di wilayah Nimboran dan Nimbokrang Papua didirikan pos-pos militer di setiap distrik, karena pada masa itu Papua menjadi daerah operasi militer (DOM). Ibunya mengatakan banyak kisah menyedihkan tentang perempuan-perempuan muda di wilayah tersebut yang diperkosa oleh militer yang bertugas menjaga keamanan. Pos-pos itu didirikan karena ada anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di sana. FD mengungkapkan bahwa menurut ibunya, perempuan-perempuan muda ini sudah ada yang berani menceritakan kejadian yang mereka alami, namun secara adat mereka justru disalahkan oleh para tetua adat yang didominasi oleh laki-laki. Para korban justru dianggap sebagai yang menimbulkan nafsu untuk diperkosa. Di sisi lain, keluarga dan perempuan (korban) tidak memiliki keberanian untuk menuntut para militer (pelaku perkosaan) karena mereka takut akan intimidasi di bawah todongan senjata. Jadi banyak perempuan muda menyembunyikan semua cerita kelam mereka. Banyak perempuan Nimborang dan Nimbokrang tidak bersuara karena mereka tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus mengadu. Apalagi secara adat mereka dianggap perempuan yang telah memiliki aib dan tidak memiliki moral. Trauma masa lalu yang terjadi bagi perempuan muda di era 1980-an, itu menjadi momok yang berkepanjangan. FD mengatakan bahwa ketika tahun 2015-2017, terjadi kekhawatiran besar ketika dibangun lagi pos-pos militer di wilayah Nimboran dan Nimbokrang akibat dugaan bahwa ada pergerakan separatis di sana (sekarang sudah tidak ada pos keamanan). Para ibu yang ada di wilayah tersebut melarang anak gadis mereka untuk berjalan dekat pos-pos militer dan tidak boleh keluar malam, karena mereka takut peristiwa yang pernah menimpa perempuan di masa lalu akan terjadi lagi. Para ibu-ibu di sana menjadi takut dan menyebabkan para perempuan muda tidak lagi memiliki kebebasan untuk beraktivitas. FD melihat bahwa apa yang dikisahkan oleh ibunya,

membuatnya tersadar bahwa para perempuan harus keluar dari rasa takut dan harus memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan baginya. Ibunya mengatakan bahwa ia, FD harus sekolah yang baik agar dapat mengubah ketidakadilan ini. FD menyadari bahwa sesungguhnya manusia baik perempuan maupun laki-laki harus sederajat, memiliki harkat dan martabat yang sama. Trauma masa lalu harus diatasi dengan serius. Perempuan Papua tidak bisa hidup dalam keadaan keterbatasan, tekanan, dan ketakutan. Bagi FD, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan agar kelak ia bisa mengubah sistem patriarki Papua yang tidak adil terhadap masalah perempuan Papua. Selain itu, dengan pendidikan yang layak, akan memberikan keberanian bagi perempuan Papua, secara khusus wilayahnya, untuk keluar dari trauma masa lalu, dan memperoleh proses penyembuhan. Hal ini merupakan keinginan FD sebagai perempuan Papua untuk melihat adanya harapan masa depan bagi keadilan perempuan.

*Telling story* dari para perempuan Papua dalam artikel ini menyadarkan saya bahwa benar mengenai apa yang dikatakan ibu saya, tidak mudah menjadi orang Papua. Kata *tidak mudah* ini mengantar pada konsep Spivak mengenai "*Can the Subaltern speak?*", dapatkah kelompok yang dianggap rendah atau bawahan berbicara? (Spivak 2010). Apalagi untuk seorang perempuan Papua untuk berjuang atas keadilan di negara ini. Asumsi ini benar karena banyak perempuan Papua yang belum berani untuk keluar dari kebisuan mereka untuk bercerita, karena mereka ketakutan. Namun, empat kisah di atas menunjukkan pentingnya pendampingan agar cerita yang selama ini terpendam dapat diangkat dan diceritakan ulang. Cerita para perempuan akan hidup ketika dikisahkan kembali melalui teks suci yang adalah merupakan bahasa tubuh, dan pengalaman mereka (Tamez 1998).

Setiap perempuan Papua memiliki caranya sendiri untuk mengekspresikan jati dirinya. Tentulah teori pascakolonial Spivak menguatkan untuk mengantar bagaimana mengangkat sejumlah cerita-cerita yang masih terpendam (Spivak 2010) di antara perempuan Papua. Pdt. Yemima Krey, seorang tokoh teologi feminis Kristen Papua mendorong perempuan Papua untuk berjuang bagi jati diri (*self-identity*) mereka sebagai maha karya yang agung dari Tuhan. Krey mengungkapkan doanya di dalam suatu tulisan yang mengatakan: "*Tuhan, Perempuan Papua yang berkulit gelap dan keriting adalah juga buatan tangan-Mu*" (Krey 1988, h. 162). Apa yang dinyatakan oleh Krey sebagai suatu bentuk dorongan

perempuan Papua untuk bersuara untuk keadilan bagi diri dan tanah Papua.

## Penutup

Janji Indonesia sebagai negara demokrasi dalam konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya ternyata masih bersifat slogan semata. Perempuan Papua menemukan betapa sulitnya untuk menyuarkan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan Papua yang sedang berjuang untuk keluar dari kebisuannya mencari cara dengan menceritakan kembali bagaimana perjuangannya untuk sebuah nilai keadilan, di tengah situasi yang sulit. Cerita perempuan Papua tentang pengalamannya adalah bagian kampanye yang menyuarkan bahwa perempuan Papua juga memiliki inisiatif keadilan dengan caranya sendiri. Walaupun berada dalam kondisi dan stigma *subaltern*, perempuan Papua mendapat keyakinan melalui penceritaan pengalaman sehingga memiliki kesanggupan untuk menyatakan bahwa mereka akan berbicara bagi diri mereka sendiri dan perempuan Papua lainnya.

Cerita "sang cenderawasih", yakni para perempuan Papua, menjadi tanda bahwa jati dirinya sedang diperjuangkan. Mereka yang sebelumnya membisu, mencari cara untuk memperjuangkan keadilan bagi tanah dan negerinya yang sudah lama tertindas dan termarginalisasi. Perjuangan untuk membuat "sang cenderawasih" itu tidak membisu membutuhkan komitmen kelompok intelektual Papua baik dari perempuan dan laki-laki. Kerja sama ini dibutuhkan untuk menata kembali kehidupan dan menghilangkan sistem patriarki yang mengakar dalam tatanan adat Papua. Selain itu, perjuangan ini bertujuan agar ada kebebasan bagi ruang gerak perempuan Papua mengekspresikan idenya. Ini adalah hal penting yang perlu dilakukan bersama-sama, terutama perempuan dan laki-laki Papua, dalam menggapai keadilan bagi orang dan tanah Papua. Sistem negara yang membungkam nilai kebenaran dan keadilan harus diterobos agar terjadi transformasi ke arah penghormatan akan hak asasi manusia. Sepenggal syair lagu Tanah Papua, yang dinyanyikan Edo Kondoligit mengatakan: "hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah aku Papua", menjadi identitas bahwa perjuangan untuk menggapai keadilan sebagai orang Papua akan terus berlangsung. Sepenggal syair tersebut juga menunjukkan bagaimana perempuan Papua terus didorong untuk menyatakan bahwa biar nanti

langit terbelah, namun perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi setiap manusia adalah sesuatu yang akan terus diperjuangkan. Perjuangan menggapai keadilan tanpa terkotak-kotakkan dengan pandang sempit mengenai gender, ras, suku, dan agama. Semua manusia baik perempuan maupun laki-laki, pemerintah maupun rakyat biasa, memiliki hak yang sama untuk hidup, berkarya dan berekspresi.

Suara "sang cenderawasih" akan bergema bagi mereka yang masih menutup telinga dan mata hati. Bagi mereka kelompok yang bertelinga namun pura-pura tuli dan memiliki mata namun seolah-olah buta. Suara "sang cenderawasih" tidak akan membisu lagi karena sudah saatnya untuk bercerita.

## Daftar Pustaka

- Ap, A C 1978, *Songger Berok*, Manyouri Group, Jayapura.
- Bariarcianur, F dan Yunus, A 2011, *Papua Jejak Langkah Penuh Kesan: An Expedition to Remember*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Flick, U 2014, *An Introduction to Qualitative Research*, Sage Publications, London.
- Krey, Y 1988, "Suatu Usaha Untuk Memahami Perkembangan Gerakan Feminisme Di Amerika Dalam Rangka Pelayanan Wanita Irian Jaya," dalam David Sulistyono and Feije Duim (ed), *Dengan Segenap Hatimu*, STT GKI & Sinode GKI Irian Jaya, Jayapura.
- Permana, D S 2019, *Burung Cenderawasih, Bird of Paradise*, diakses pada September 2021 pukul 17.00 WIT, <https://foresteract.com/burung-cendrawasih/#:~:text=Burung%20>
- Pokja MRP dan Komnas Perempuan 2010, *Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*, PT Sandiwan Media Cipta, Jakarta.
- Rumaseb, A 2013, *Ironi Papua*, Pelita, Jayapura.
- Saltford, J 2003, *United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962 - 1969: The Anatomy of Betrayal*, Routledge Curzon, London.
- Sebagian Besar KDRT Akibat Pengkonsumsian Miras 2021, diakses pada September 2021 jam 17.00 WIT <https://papua.go.id/view-detail-berita-5055/undefined>
- Silverman, D dan Marvasti, A 2008, *Doing Qualitative Research: A Comprehensive Guide*, SAGE Publications, Los Angeles.
- Spivak, G C 2010, "Can the Subaltern Speak? Revised edition", dalam R C Morris (ed), *Can the Subaltern Speak, Reflections on the History of an Idea*, hh. 21-78, Columbia University Press, New York.
- Tamez, E 1988, 'Women's Lives as Sacred Text,' dalam Kwok Pui-Lan and Elisabeth Schüssler Fiorenza (eds), *Women's Sacred Scriptures, in Concilium*, vol. 3, SCM Press, London, Orbis Books, Maryknoll.
- Van Hasselt, F J F 2002, *Di Tanah Orang Papua*, Joost W.Mirino (ed), Yayasan Timotius Papua, Jayapura.